

BAB III

BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 2004 DAN BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA INTERNASIONAL

Jepang sebagai negara yang memiliki nasib yang sama dengan Indonesia yaitu secara geografis berada di tempat rawan gempa, memiliki banyak pengalaman serta manajemen bencana yang baik ketimbang dengan Indonesia. Dimulai dari upaya untuk menangani bencana secara internal hingga eksternal dengan membuat forum internasional yang telah melibatkan banyak negara. Indonesia sebagai negara yang masih rentan akan bencana masih memiliki sistem penanganan bencana yang minim. Bencana gempa dan Tsunami yang menimpa Aceh pada tahun 2004 telah mengorbankan banyak jiwa. Perhatian dunia telah menuju kepada Indonesia, dan banyak negara yang berusaha untuk menawarkan bantuan khususnya Jepang. Pada bab ini akan menjelaskan kejadian bencana Gempa dan Tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 secara kronologis, dan kerugian-kerugian yang ada serta bantuan penanganan yang diberikan oleh publik Internasional kepada Indonesia.

A. Bencana Gempa dan Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesia)

Tsunami (diucapkan "*soo-nah-mee*") merupakan serangkaian gelombang yang dihasilkan oleh gangguan bawah laut seperti gempa bumi. Kata ini berasal dari bahasa Jepang, diwakili oleh dua karakter: "*tsu*" (pelabuhan) dan "*nami*" (gelombang). Tsunami sering salah disebut sebagai gelombang pasang surut. Sebenarnya, pasang-surut hasil dari pengaruh gravitasi bulan, matahari, dan planet-planet, sebuah fenomena yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tsunami. Ada banyak peristiwa yang menghasilkan gelombang tsunami, tetapi gempa bumi adalah yang paling umum. Kekuatan lain yang menghasilkan gelombang besar termasuk tanah longsor, letusan gunung berapi, ledakan dan, meskipun sangat jarang, dampak benda-benda luar angkasa, seperti meteorit (Coppola, 2011).

Tsunami dihasilkan ketika sebagian besar air dipindahkan, baik oleh pergeseran dasar laut setelah gempa bumi atau dengan

diperkenalkannya massa dari peristiwa lain. Gelombang terbentuk ketika massa air yang dipindahkan berusaha untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua gempa bumi menghasilkan tsunami. Untuk melakukan itu, gempa bumi harus terjadi di bawah atau di dekat lautan, menjadi besar besarnya, dan menciptakan gerakan vertikal (atas/bawah) di dasar laut. Sementara semua wilayah lautan di dunia dapat mengalami tsunami, negara-negara yang berada di kawasan Lingkar Pasifik menghadapi frekuensi yang jauh lebih besar dari tsunami besar yang merusak karena kehadiran banyaknya gempa bumi besar di “*Ring of Fire*” yang aktif secara seismic (NOAA, 2009).

Gelombang yang dihasilkan bergerak ke luar di semua atau dalam arah terbatas dari area gangguan, tergantung pada jenis bentuk, posisi dan dimensi atau deformasi. Waktu antara puncak gelombang dapat berkisar dari hanya 5 menit hingga 90 menit, dan kecepatan gelombang di lautan rata-rata mencapai 450 mil perjam. Ketinggian ombak lebih dari 100 kaki telah direkam. Di lautan terbuka, tsunami hampir tidak terdeteksi oleh sebagian besar kapal di jalurnya. Ketika gelombang mendekati perairan pantai yang dangkal, tampak normal tetapi kecepatannya menurun secara signifikan. Kompresi gelombang yang dihasilkan dari penurunan kedalaman laut menyebabkan gelombang tumbuh lebih tinggi dan menabrak daratan yang sering kali mengakibatkan kerusakan besar, cedera, dan kematian. (NOAA, 2009)

Bencana tsunami merupakan salah satu jenis bencana yang kerap melanda Indonesia yang menyebabkan kerusakan yang luas dan jumlah korban yang besar. Dalam kurun satu dekade terakhir, Indonesia telah dilanda beberapa kali bencana tsunami dengan kerusakan dan jumlah korban yang begitu banyak seperti peristiwa tsunami tahun 2004 di Aceh dan Nias, tsunami di Pangandaran tahun 2006, dan tsunami di Kepulauan Mentawai di tahun 2010. Mengingat begitu banyak jumlah penduduk, perkotaan, dan infrastruktur yang berada di kawasan yang rawan terhadap bencana tsunami, maka penanggulangan bencana tsunami di Indonesia semestinya mendapatkan perhatian yang memadai. Indonesia terletak pada pertemuan empat lempeng bumi yang aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, Lempeng

Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Filipina. Lempeng tersebut saling mendorong satu sama lain. Aktifitas lempeng tersebut adalah penyebab tsunami paling sering di wilayah Indonesia (Coppola, 2011).

1. Sejarah Terjadinya Tsunami di Indonesia

Tsunami umumnya terjadi karena gempa bumi di laut, longsornya dasar laut, meletusnya gunung api, dan kejatuhan meteor. Di Indonesia, tsunami yang pernah terjadi adalah disebabkan oleh Gempa bumi di laut, meletusnya gunung api, dan longsornya dasar laut. Catatan tsunami paling awal yang pernah ditemukan adalah tsunami 1907 yang terjadi di sekitar Pulau Simeulue, Provinsi Aceh. Dengan metode kajian deposit sedimen (*Paleotsunami*), catatan tsunami di Indonesia dapat merekam hingga peristiwa tsunami hampir seribu tahun lalu (Rusydy, 2013).

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa wilayah Provinsi Aceh telah mengalami beberapa kali peristiwa tsunami yang cukup besar. Bukan sekali ini saja tsunami Samudra Indonesia menikam ujung barat Sumatera, pun pada tahun 1768, 1816, 1869, dan 1907. Geulumbang raya atau ie beuna (air bah) hasil picuan gempa 9.1 dan 9.3 skala Richter terhebat kedua yang pernah dicatat seismograf itu telah merenggut 150.000-an nyawa (Dirhamsyah, 2013). Ribuan lainnya mendadak berstatus tunawisma. Sedemikian kuat sentakan yang ditimbulkan, sampai-sampai periode rotasi bumi pada porosnya bergerak lebih cepat 3 mikrodetik. Poros itu sekarang miring permanen sekitar 2,5 sentimeter. Beberapa tempat lainnya juga diketahui memiliki sejarah perulangan peristiwa tsunami seperti halnya yang ditemukan di Aceh.

Salah satu tsunami yang disebabkan oleh meletusnya gunung api adalah peristiwa tsunami yang terjadi pada Tanggal 27 Agustus 1883 yang disebabkan oleh meletusnya Gunung api Krakatau (BBCEditor, 2018). Peristiwa tsunami akibat Gunung api Krakatau ini tidak didahului dengan surutnya air laut sebagaimana lazim yang ditemukan pada kasus tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi. Beberapa tsunami juga pernah mengakibatkan kerusakan yang masif di wilayah Selatan Pulau Jawa. Pada Tanggal 3 Juni 1994, tsunami dengan ketinggian gelombang 9,5 meter menghantam wilayah Lumajang, Jember, dan Banyuwangi

(Rachmawati, 2019). Berikut peristiwa tsunami di Indonesia yang disebabkan oleh gempa bumi:

Tabel 3.1 Peristiwa Tsunami Indonesia yang disebabkan oleh Gempabumi

No	Lokasi	Tahun Peristiwa	Besaran Gempa (Mw)	Akibat Tsunami			Maks Gelombang (m)
				Meninggal	Luka-Luka	Rumah Rusak	
1	Aceh	2004	9,2	220.898	125.000	139.195	50,9
2	Nias	2005	8,7	10			3
3	Bali	1818	8,5	-	-	-	3,5
4	Bengkulu	2007	8,4	-	-	-	1
5	Laut Sulawesi	1918	8,3	-	-	-	7,2
6	Papua	1996	8,2	110	100		7,7
7	Sunda	1997	8	189	75		15
8	Laut Banda	1996	7,9	9	63	283	3,4
9	Laut Andaman	1881	7,9				
10	Laut Flores	1992	7,8	2.500	500	31.785	26,2
11	Laut Jawa	1994	7,8	250	233	1.500	13,9
12	Kepulauan Mentawai	2010	7,7	485	-	-	-

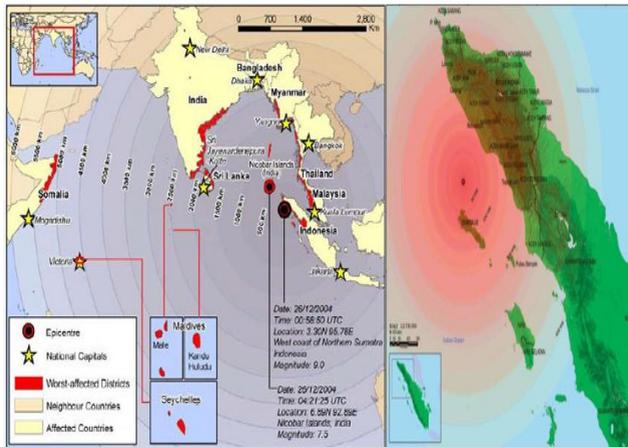
(Sumber:(Dirhamsyah, 2013))

Tabel di atas menunjukkan daftar peristiwa tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi di wilayah Indonesia. Data ini merupakan gabungan dari beberapa sumber seperti data base NOAA dan Laporan BNPB.

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat bahwa peristiwa tsunami yang terjadi di Indonesia didominasi oleh peristiwa gempa bumi dasar laut. Namun demikian, penting diperhatikan bahwa beberapa peristiwa lain masih berpotensi menciptakan tsunami di masa yang akan datang seperti meletusnya Gunung Api Krakatau. Mengingat aktifitas gunung api relatif lebih terpantau dalam waktu yang lebih panjang, maka bahaya tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi akan menjadi tantangan serius untuk diperhatikan (Dirhamsyah, 2013).

Gempa dan tsunami di Aceh terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, pukul 7:58:53 waktu setempat, gempa bumi berkekuatan 9,1 pada Skala Richter terjadi di Samudra Indonesia, episentrumnya terletak di lepas pantai barat Sumatra, terletak antara Pulau Simeulue dan Sumatra. Pusat gempa terletak pada koordinat $3,316^{\circ}$ Lintang Utara dan $95,854^{\circ}$ Bujur Timur, dengan kedalaman 30 kilometer dan kurang lebih 250 kilometer sebelah selatan Banda Aceh, ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Arie, 2009).

Gambar 2 Penampakan dari gempa bumi di pantai barat Sumatra



(Sumber: (BRR-Report, 2005))

Ini adalah gempa bumi terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf dan durasi patahan terpanjang sepanjang sejarah. Gempa dan tsunami ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah dunia. Indonesia adalah negara yang dampaknya paling parah selain India, Thailand dan Sri Lanka. Bencana ini dikenal dengan beberapa nama Tsunami Samudra Hindia 2004, Tsunami Asia Selatan, Gempa Bumi Sumatra-Andaman, Tsunami Natal, Tsunami Boxing Day dan Tsunami Indonesia (Arie, 2009).

Suatu pagi di hari Ahad itu seketika berubah menjadi malapetaka. Mula-mula adalah gempa yang membuat orang pun tak bisa bertahan berdiri. (Kemudian diketahui gempa tersebut berkekuatan 9,1 skala Richter-hanya kurang 0.9 skala untuk mencapai angka 10, skala terbesar pada seismograf, alat pengukur gempa). Bencana maha dahsyat, gempa yang disusul tsunami, meluluhlantakkan sebagian Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara hanya dalam hitungan detik, tumpah-ruah pemandangan terpampang kontras, dari mempunyai, sekonyong-konyong tiada mempunyai. Air dan lumpur tsunami merangsak dan menggenangi hingga tengah Kota Banda Aceh. Ketika tsunami itu menggulung daratan Aceh, korban yang selamat sempat berpikir: kiamatkah hari ini? Lalu korbanpun teringat hadis bahwa kiamat terjadi pada hari Jumat. Hari itu, 26 Desember 2004, adalah hari Ahad, jadi petaka ini bukanlah akhir zaman. Maka orang-orang yang dikaruniai panjang umur itu pun menjadi saksi kedahsyatan bencana tersebut.

Saksi mata menuturkan, tsunami diawali dengan surutnya air laut hingga 200 meter dari garis pantai. Selang 10-15 menit kemudian, gelombang laut setinggi lebih dari 20 meter menggulung seketika dan menghempas daratan. Dengan kecepatan sekitar 500 km/jam tsunami bergerak menghantam kawasan pesisir barat Aceh. Bencana tak bisa ditolak, anugerah tak bisa diharap, begitu kata pepatah. Kosakata verba yang paling banyak mengisi otak pada saat itu adalah mengguncang, merobohkan, menghantam, menerjang, menggulung, memorak-porandakan, menghanyutkan, mencabik-cabik, meremukkan, menghajar, meluluh lantakkan, mencincang, mengoyak-moyak, merenggut, menggerus, dan suami raib dari istri. Istri raib dari suami. Anak hilang bapak. Ibu hilang anak. Keluarga kehilangan rumah, tanah-ladang, perahu, toko, kendaraan, tambak, atau modal usaha. Masyarakat kehilangan sekolah, masjid, jalan, pelabuhan, pasar, dan jembatan. Ya, sebermula karena tsunami.

Sebelum tsunami, tercatat penduduk Aceh sekitar 4.297.485. Berdasarkan sensus 2005, warga Aceh adalah 4.031.589 orang, atau berkurang sekitar 265.896. Sedangkan jumlah korban total, termasuk yang bukan warga Aceh, mendekati 127.000 orang, ditambah 93.285 yang dinyatakan hilang (Arie, 2009).

Wilayah itu seluas tiga kali DKI Jakarta, dan sudah tentu ini bukan wilayah yang tak bertuan. Di wilayah seluas itu, selain penduduk, juga banyak prasarana dari jalan sampai pasar, dari jembatan sampai gedung sekolah. Angka-angka yang diperoleh kemudian membuktikan betapa dahsyatnya bencana itu. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menyatakan gempa bumi yang terjadi di Minggu pagi tersebut merupakan bencana alam terparah di Indonesia semenjak letusan Gunung Krakatau pada 1883 (Arie, 2009).

Pergeseran lempeng bawah laut India dan Myanmar menyebabkan sepanjang kurang lebih 1.200 kilometer lempeng patah dan tenggelam sehingga menimbulkan pergeseran pada Patahan Sunda. Hal inilah yang memicu terjadinya gempa bumi yang disusul dengan tsunami. Tidak hanya Aceh, tsunami juga memporandakan kawasan pesisir Thailand, India, Sri Lanka, Bangladesh, dan negara-negara lain hingga Afrika Timur.

Pascagempa besar tersebut, serangkaian gempa susulan yang relatif lebih kecil terjadi di awal 2005. Namun pada 28 Maret 2005, pukul 23:09:36 waktu setempat, sebuah gempa besar kembali terjadi di Samudra Indonesia. Gempa yang berkekuatan 8,6 pada Skala Richter berpusat di koordinat 2,074° Lintang Utara dan 97,013° Bujur Timur, dengan kedalaman 30 kilometer, kurang lebih 245 kilometer sebelah barat daya Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara (Arie, 2009).

2. Dampak Gempa dan Tsunami Aceh 2004

Kedua bencana alam yang maha dahsyat ini menewaskan lebih dari 220.000 jiwa dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kerusakan sangat parah terjadi di sepanjang 800 kilometer garis pantai Aceh setara dengan jarak antara Jakarta-Surabaya atau San

Fransisco-San Diego, Amerika Serikat, dan menjangkau hingga 6 kilometer ke arah daratan. Sekitar 139.000 rumah rusak, jembatan-jembatan terputus, aliran listrik padam, peralatan telekomunikasi tidak berfungsi, pasokan air minum terhenti, dan 2.600 kilometer jalan rusak. Tidak hanya itu, fasilitas-fasilitas kesehatan rusak berat dan ribuan sekolah hancur (Arie, 2009). Berikut dampak bencana gempa dan tsunami bumi digambarkan dengan lebih mendetail:

Tabel 3.2 Daerah korban meninggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatra Utara

No	Kabupaten	Populasi	Meninggal	Hilang	Total
1	Banda Aceh	260.478	13.785	58.981	110.971
2	Aceh Besar	302.405	3	27.796	66.526
3	Aceh Jaya	98.796	107.342	77	16.462
4	Aceh Barat	195.000	16.874	2.911	13.061
5	Nagan Raya	143.985	2.652	877	5.178
6	Aceh Barat Daya	115.358	6	1.086	2.649
7	Sabang	26.303	-	244	2.016
8	Aceh Pidie	517.898	-	865	1.942
9	Bireun	361	-	58	519
10	Aceh Utara	691.079	51	277	469
11	Aceh Timur	454.501	2.316	108	133
12	Aceh Selatan	192.947	15.394	0	52
13	Aceh Tenggara	150.776	-	0	31
14	Aceh Tengah	246.901	519	1	8
15	Bener Meriah	112.000	-	4	4
16	Aceh Tamiang	225.011	-	0	3
17	Aceh Singkil	124.758	200	0	2
18	Simeulue	77.761	1.942	0	0
	TOTAL	4.297.485	126.741	93.285	220.026

(Sumber: (BRR-Report, 2005))

Pada Tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa korban jiwa terbanyak berasal dari Aceh Jaya yaitu sebanyak 107.342 jiwa. Total jiwa yang hilang berasal dari Banda

Aceh sedangkan jika dijumlahkan jiwa yang meninggal dan hilang maka terbanyak berasal dari Banda Aceh.

Tabel 3.3 Dampak kerusakan rumah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatra Utara

No	Kabupaten	Rumah Rusak
1	Aceh Besar	27.262
2	Banda Aceh	18.790
3	Aceh Jaya	15.641
4	Aceh Barat	15.361
5	Pidie	10.389
6	Bireun	8.684
7	Aceh Utara	5.902
8	Simeulue	5.641
9	Nagan Raya	3.588
10	Aceh Singkil	2.951
11	Aceh Selatan	2.135
12	Aceh Barat Daya	1.693
13	Aceh Timur	1.300
14	Lhokseumawe	1.232
15	Sabang	611
16	Aceh Tamiang	200
17	Aceh Tengah	-
18	Aceh Tenggara	-
19	Bener Meriah	-
20	Gayo Lues	-
21	Langsa	-
	Total NAD	121.381
22	Nias	17.814
23	Nias Selatan	-
	Total Keseluruhan	139.195

(Sumber: (BRR-Report, 2005)

Dapat disimpulkan dari Tabel 3.3 Dampak kerusakan rumah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias bahwa total rumah rusak paling banyak berasal dari Aceh Besar yaitu sebanyak 27.262 rumah. Sedangkan daerah yang mengalami kerusakan paling sedikit

yaitu terdapat di Aceh Tamiang yaitu sebanyak 200 rumah yang rusak akibat bencana gempa dan tsunami.

Tabel 3.4 Dampak infrastruktur rusak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

No	Kabupaten	Rusak				
		Jalan Provinsi (Km)	Jalan Kabupaten (Km)	Jalan Lingkungan (Km)	Jembatan (Unit)	Jembatan Arteri (Unit)
1	Aceh Barat	52.06	67.37	318.26	461	43
2	Aceh Barat Daya	1.25	7.27	5	1	-
3	Aceh Besar	40.31	111.91	295.17	69	12
4	Aceh Jaya	132.80	58.68	169.76	52	41
5	Aceh Selatan	0.27	0.30	6.52	11	4
6	Aceh Singkil	5.43	1.23	2	-	-
7	Aceh Tamiang	-	-	-	-	-
8	Aceh Tengah	-	-	-	-	-
9	Aceh Tenggara	-	-	-	-	-
10	Aceh Timur	16.34	1.20	15.15	31	
11	Aceh Utara	7.00	48.10	73.36	26	
12	Banda Aceh	0.50	27.13	178.66	616	9
13	Bener Meriah	-	-	-	-	-
14	Bireun	4.80	26.95	140.08	61	
15	Gayo Lues	-	-	-	-	-
16	Kota Langsa	0.20	-	-	-	-
17	Kota Lhokseumawe	6.60	8.70	15.54	6	
18	Nagan Raya	279.99	231.57	16.65	18	9
19	Pidie	8.57	50.76	56.36	16	
20	Sabang	8.00	7.40	1	-	-
21	Simeulue	46.26	14.71	59.26	134	
	TOTAL	603.50	654.06	1360.87	1509.00	119.00

(Sumber: (BRR-Report, 2005))

Dari tabel 3.4 terdapat penjelasan jumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nagan Raya adalah wilayah dengan jalan yang paling banyak mengalami kerusakan, yaitu sebesar 279.99 km jalan provinsi dan 231.57 km jalan kabupaten yang rusak. Sedangkan Aceh Barat mengalami kerusakan jalan lingkungan yang paling parah, yaitu sebesar 318.26 km jalan yang rusak. Kemudian kerusakan jembatan yang paling banyak terjadi berasal dari Banda Aceh yaitu sebanyak 616 jembatan yang mengalami kerusakan.

Tabel 3.5 Dampak sarana transportasi rusak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

No	Kabupaten	Rusak			
		Boat (Unit)	Pelabuhan Feri (Unit)	Pelabuhan Laut (Unit)	Airport (Unit)
1	Aceh Barat	662	1	1	
2	Aceh Barat Daya	108		1	1
3	Aceh Besar	1.330	1	1	
4	Aceh Jaya	455	1		
5	Aceh Selatan	409	1	1	1
6	Aceh Singkil	659	2	1	
7	Aceh Tamiang	1.577	-	-	-
8	Aceh Tengah	0	-	-	-
9	Aceh Tenggara	0	-	-	-
10	Aceh Timur	561	-	-	-
11	Aceh Utara	952	-	-	-
12	Banda Aceh	318	1		1
13	Bener Meriah	0	-	-	1
14	Bireuen	1.393	-	-	-
15	Gayo Lues	0	-	-	-
16	Kota Langsa	524		1	
17	Kota Lhokseumawe	783	1	-	-
18	Nagan Raya	512	-	1	-
19	Pidie	1.321			
20	Sabang	356	1	1	1
21	Simeulue	846	1	1	1
	Total	12.766	8	10	7

(Sumber: (BRR-Report, 2005))

Pada tabel 3.5 menunjukkan daftar dari dampak sarana transportasi yang rusak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut data yang tertera, daerah Aceh Tamiang memiliki kerusakan terbanyak dalam transportasi kapal (*boat*) yaitu sebanyak 1.577 unit yang rusak. Setelah itu diikuti dengan daerah Bireun dengan total sebanyak 1.393 unit yang rusak. Serta total dari seluruh kerusakan yaitu 12.766 unit.

Tabel 3.6 Dampak sekolah rusak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

No	Kabupaten	Sekolah Rusak				Sekolah Sebelum Bencana
		SD	SMP	SMA	JUMLAH	
1	Aceh Barat	168	39	21	228	297
2	Aceh Barat Daya	12	6	4	22	154
3	Aceh Besar	92	21	9	122	392
4	Aceh Jaya	65	19	11	95	164
5	Aceh Selatan	22	8	6	36	308
6	Aceh Singkil	153	39	24	216	243
7	Aceh Tamiang	46	9	6	61	325
8	Aceh Tengah	183	37	18	238	na
9	Aceh Tenggara	170	48	32	250	na
10	Aceh Timur	158	23	7	188	366
11	Aceh Utara	189	49	25	263	629
12	Banda Aceh	98	30	43	171	302
13	Bener Meriah	11	2	3	16	na
14	Bireuen	154	45	24	223	373
15	Gayo Lues	1	1	1	3	na
16	Kota Langsa	2	0	0	2	148
17	Kota Lhokseumawe	15	11	14	40	171
18	Nagan Raya	114	22	10	146	171
19	Pidie	193	51	35	279	428
20	Sabang	14	3	3	20	57
21	Simeulue	130	42	18	190	168
Total		1.990	505	314	2.809	4.696

(Sumber: (BRR-Report, 2005))

Pada tabel 3.6 menunjukkan daftar kerusakan sekolah yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut data yang tertera, jumlah daerah dengan kerusakan terbanyak yaitu Pidie yaitu sebanyak 279 sekolah. Sedangkan Kota Langsa menjadi kota dengan kerusakan sekolah terdikit yaitu hanya dua sekolah yang mengalami kerusakan.

Tabel 3.7 Dampak lahan pertanian dan tambak rusak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

No	Kabupaten	Lahan Pertanian (Ha)	Lahan Tambak (Ha)
1	Aceh Barat	3.016	285
2	Aceh Barat Daya	2.570	10
3	Aceh Besar	6.912	835
4	Aceh Jaya	3.255	440
5	Aceh Selatan	736	108
6	Aceh Singkil		
7	Aceh Tamiang		
8	Aceh Tengah		
9	Aceh Tenggara		
10	Aceh Timur	119	2.384
11	Aceh Utara	1.026	1.443
12	Banda Aceh		220
13	Bener Meriah		
14	Bireuen	3.100	2.390
15	Gayo Lues		
16	Kota Langsa		
17	Kota Lhokseumawe	44	19
18	Nagan Raya	28.190	480
19	Pidie	24.901	18.979
20	Sabang		
21	Simeulue		
Total		73.869	27.593

(Sumber: (BRR-Report, 2005))

Pada tabel 3.7 terdapat informasi tentang lahan pertanian dan lahan tambak yang rusak di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam. Berdasarkan data yang tertera, lahan pertanian yang mengalami rusak parah yaitu pada daerah Nagan Raya, sebesar 28.190 HA. Sedangkan lahan tambak yang mengalami kerugian terbesar yaitu pada daerah Pidie yaitu dengan lahan rusak sebesar 18.979 HA.

Jika dilihat dari kerusakan yang tertera, Indonesia khususnya Aceh mengalami situasi yang darurat. Aceh tidak hanya membutuhkan seluruh bantuan dari dalam negeri bahkan juga membutuhkan bantuan kemanusiaan dari “luar”. Penyaluran bantuan tidak cukup hanya dari dalam, karena itu banyak negara yang menawarkan diri untuk mengirimkan bantuan setelah bencana ini terjadi.

B. Reaksi Pemerintah Indonesia dan Masyarakat Internasional dalam Penanggulangan Bencana Aceh

Setelah mengalami situasi yang sangat mencekam dan mengkhawatirkan, pemerintah Indonesia bertindak cepat untuk membantu Aceh. Minggu, 26 Desember 2004, sekitar pukul 11.00 Waktu Indonesia Timur. Rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di Bandara Nabire, Papua yang saat itu rombongan bersiap masuk pesawat untuk terbang ke Jayapura. Rombongan presiden tersebut baru saja mengunjungi korban gempa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Disaat itu telepon seluler Menteri Koordinator (Menko) Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab mendapatkan pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) dan kemudian membaca pesan tersebut: “Ada gempa dahsyat di Aceh”. Walaupun meragukan kebenaran SMS itu, reaksi Presiden spontan untuk meminta kabar itu dicek ulang segera. (Arie, 2009)

Pada hari yang sama di Jakarta, pagi itu acara Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghadiri halalbihalal keluarga besar Aceh di Istora Senayan sempat terhambat karena mendapatkan informasi dari anggota staf Wapres yang menyampaikan pesan singkat yang masuk ke telepon selulernya: “Pak, di Aceh ada gempa, dahsyat sekali.” Wapres tertegun. Segera Ia mengirim pesan singkat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk mengabarkan soal gempa di Aceh. Jawab

Presiden: “Saya sudah tahu. Tolong koordinasikan”. Sebagai Ketua Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, bencana adalah urusannya. (Arie, 2009)

Sementara itu, salah seorang anggota staf Wapres menelepon Budi Atmadi Adiputro, Deputy Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) yang selama ini menjadi tangan kanan Jusuf Kalla dalam urusan bencana. Pada masa pemerintahan sebelumnya pun keduanya sudah bekerja sama menangani berbagai bencana nasional. Waktu itu Jusuf Kalla adalah Menko Kesejahteraan Rakyat, *ex-officio* atau yang secara otomatis menjabat pula sebagai Wakil Ketua Bakornas, sedangkan Budi sudah menjabat sebagai Deputy Bakornas. Segera ia menelepon teman-temannya di Banda Aceh. Telepon tak kunjung tersambung. Gagal memperoleh keterangan dari Banda Aceh, ia pun menghubungi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) di Jakarta. Keterangan BMG sungguh mengejutkan: benar, ada gempa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan jarum alat pengukur gempa di BMG sampai mentok. Jadi, menurut alat yang disebut seismograf itu, skala gempa tersebut besar sekali.

Acara halalbihalal masyarakat Aceh di Istora Senayan pagi itu yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dibuka oleh pidato Wakil Gubernur Aceh Azwar Abubakar yang memberikan sambutan semula santai dan meriah, mendadak berubah. Beliau mengatakan hatinya tengah terbelah karena di Aceh ada gempa besar. Pidato sambutan Wapres singkat, lalu acara bubar. Wapres tak segera beranjak, malah mengadakan rapat mendadak di Istora Senayan itu juga, dikarena beberapa pejabat hadir dalam halalbihalal tersebut. Dalam rapat mendadak tersebut, Wakil Presiden memutuskan mengirim tim ke Aceh untuk langsung mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Wapres memberi tahu pilot pribadinya supaya menerbangkan pesawat pribadinya untuk berangkatkan Wakil Gubernur Aceh dan istri serta sejumlah menteri seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil dan Menteri Perumahan Yusuf Asy’ari, Deputy Bakornas Budi Atmadi Adiputro, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Mar’ie Muhammad dan sejumlah tokoh Aceh untuk diterbangkan langsung ke Banda Aceh. Wakil

Presiden Jusuf Kalla tidak ikut terbang ke Aceh, Ia mengendalikan tim penanggulangan bencana dari Jakarta karena, “Presiden sedang berada di Nabire”. (Arie, 2009)

Wakil presiden berpesan kepada Deputy Bakornas supaya mengambil komando Di Aceh. Sesampainya di Aceh, segera rapat kilat dilakukan untuk pertama kalinya membentuk tim penanggulangan bencana sementara. Sebagaimana dipesankan Wapres, Budi Atmadi disepakati bersama untuk memimpin tim ini. Ketua Bakornas mengeluarkan SK Nomor 01/2004 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh. Dalam tim ini tergabungnya Wakil Gubernur Azwar Abubakar, Pangdam Iskandar Muda Mayjen Endang Suwarya dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Irjen Bachrumsyah Kasman. Setelah membentuk tim dan melihat kondisi disekitar, tim langsung melaporkan kepada Wakil Presiden menggunakan radio komunikasi militer *single-sideband* (SSB) bahwa Aceh porak-poranda.

Informasi semakin jelas dari laporan langsung Pangdam Iskandar Muda Mayjen Endang Suwarya kepada Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, yang pada saat kejadian langsung memberikan komando untuk memberikan pertolongan kepada korban yang masih hidup dan mengevakuasi korban yang meninggal. Inilah pasukan penolong dan pengevakuasi mayat pertama yang terkoordinasi oleh Pangdam Iskandar Muda, terdiri atas 500 siswa Sekolah Calon Perwira dan Hampir seribu anggota Kodam yang berasal dari Markas Batalyon 112. Meskipun Panglima TNI sudah membayangkan besarnya bencana berdasarkan laporan dari Mabes TNI, laporan Pangdam yang lebih detail memberikan gambaran bahwa bencana di Aceh mahadahsyat dan tak pernah terjadi sebelumnya. Maka siang hari itu juga Panglima terbang ke Lhokseumawe, antara lain untuk memberikan laporan kepada Presiden, yang hari itu terbang dari Jayapura ke Aceh.

Setelah mendapatkan informasi yang sudah jelas, malam hari itu juga Presiden menyatakan gempa di Aceh sebagai bencana nasional. Pemerintahan SBY-JK pada hari itu baru berusia dua bulan lebih sepekan harus menanggulangi bencana yang dikatakan sebagai bencana dahsyatnya belum pernah di

saksikan dan skala bencana Aceh ini sangatlah besar, suatu skala yang belum pernah dihadapi. Dugaan ini tidak berlebihan, dikarenakan diketahui bahwa sepanjang pantai Banda Aceh sejauh enam kilometer ke daratan tersapu tsunami. Total di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam, daratan yang “rata dengan tanah” ini 28.485 hektare atau hampir 40 persen luas DKI Jakarta. Sebagian besar daerah tersebut adalah kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi seperti pasar dan pertokoan. Jadi, meski luas daratan yang porak-poranda kurang dari setengah persen, korban meninggal sekitar 7,5 persen dari total penduduk Nanggroe Aceh Darussalam atau 126.741 orang. (Arie, 2009)

Dengan reaksi cepat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bencana di Aceh sebagai bencana nasional, dengan sendirinya menggerakkan semua departemen dan kementerian untuk segera memberikan bantuan ke sana. Dinyatakan lah hari berkabung nasional tiga hari, pernyataan ini sekaligus sebagai imbauan agar seluruh rakyat Indonesia ikut berdukacita dan memberikan bantuan semampunya, kalaulah bukan materil, ya moril saja. Dua pernyataan Presiden ini tak hanya menggerakkan birokrasi, tapi juga seluruh bangsa, untuk ikut menangani bencana di Aceh dan Sumatera Utara itu.

Sesampainya Presiden di Banda Aceh, Presiden menyarankan empat prioritas penanganan bencana, yaitu perbaikan komunikasi, distribusi bahan logistik dan obat-obatan, relokasi pengungsi, serta pencarian orang hilang dan jenazah. Dahsyatnya bencana yang di hadapi, Presiden SBY dan Wakil Presiden JK menyepakati untuk membuka isolasi Aceh dari dunia luar, bahwa Aceh yang masih dirundung konflik terbuka untuk para pekerja kemanusiaan. Beberapa hari setelah bencana, SBY mengumumkan bahwa angkasa Republik Indonesia terbuka bagi penerbangan asing yang membawa bantuan untuk Aceh dan Nias, Pemerintah menegaskan status Aceh tetap darurat sipil. Wapres menghubungi sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa *UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) agar melakukan koordinasi bantuan internasional (Arie, 2009).

Dilain pihak, Panglima Tentara Nasional Indonesia langsung menyetujui tawaran bantuan militer dari negara-negara sahabat, dikarenakan alat angkut udara seperti pesawat Hercules yang TNI miliki saat itu hanya enam pesawat dan itupun jam terbangnya sudah hampir habis. Demikian juga ketersediaan helikopter TNI juga jumlahnya terbatas. Besarnya bencana menyebabkan helikopter, alat-alat berat, bahkan peranti pembersih dan penjernih air untuk minum, semua yang mutlak diperlukan setelah bencana gempa dan tsunami terjadi, yang kita miliki tak lagi mencukupi. Presiden menginstruksikan Panglima TNI mengatur keterlibatan unsur-unsur militer asing dan Pemerintah menyatakan keberadaan militer asing di Aceh hanya tiga bulan.

Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN khusus membahas bencana tsunami, konferensi itu diselenggarakan di Jakarta pada 6 Januari 2005. Pertemuan khusus sehari yang dihadiri 15 kepala pemerintahan/negara, menteri dari 12 negara, serta pengamat dan wakil organisasi internasional (antara lain Bank Dunia, UNDP, ADB, dan IDB). Presiden pun mengundang Sekjen PBB Kofi Annan untuk hadir, pidato Sekjen PBB Kofi Annan menegaskan, secara bersama-sama, sesuatu yang mustahil dilakukan menjadi mungkin. “Kita tak bisa menghentikan tsunami, tapi secara bersama-sama kita bisa menghentikan ‘tsunami’ berikutnya”. Konferensi Khusus Para Pemimpin ASEAN Pascagempa dan Pascatsunami di Jakarta menghasilkan sebuah deklarasi untuk memperkuat penanganan tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi setelah gempa dan tsunami (EMBEDior, 2005).

Pertemuan khusus itu juga menelurkan sebuah deklarasi, *Declaration on Actions to Strengthen Emergency Relief, Rehabilitation and Reconstruction on the Aftermath of Earthquake and Tsunami Disaster of 26 December 2004* (ASEANeditors, 2005). Ada dua hal pokok dalam deklarasi itu. Pertama, disepakati untuk mencari upaya mencegah jatuhnya korban yang lebih besar dalam bencana serupa di masa depan. Ini bukan hanya soal pemasangan instrumen peringatan dini, melainkan juga meliputi pendidikan masyarakat untuk mengenal

seluk-beluk gempa dan tsunami. Yang kedua, disadari bahwa penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan darurat korban dan dana untuk pemulihan kehidupan korban sangatlah penting. Mengantisipasi hasil KTT ASEAN di Jakarta, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) menggalang suara di PBB. Kesiapan PBB sangat dibutuhkan dan perlu ada payung hukumnya: Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tsunami 2004. Hasilnya Pemerintah dan PBB membentuk *Disaster Management Center (DMC)*. (Arie, 2009)

Kesibukan lain pun terjadi di Jenewa, Swiss, kantor PBB yang lain. Seluruh komponen sibuk mempersiapkan Imbauan Kilat (*Flash Appeal*) PBB untuk menggalang bantuan bagi Negara-negara yang terkena tsunami. Indonesia sendiri dipimpin Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Sri Mulyani Indrawati dalam Pertemuan Tingkat Menteri tentang Dukungan Kemanusiaan kepada Komunitas Terdampak Tsunami (*Ministerial-level Meeting on Humanitarian Assistance to Tsunami-Affected Communities*) pada 11 Januari 2005, yang menjadi ajang diluncurkannya *flash appeal* tersebut. Luar biasa, *flash appeal* kali ini menghasilkan janji bantuan sebesar US\$ 6,3 miliar untuk seluruh wilayah yang terdampak tsunami. (Arie, 2009)

Draf resolusi pun rampung dan kemudian disahkan dalam Sidang Khusus Majelis Umum PBB, 19 Januari 2005. Resolusi ini menekankan tata cara kerja PBB membantu pemulihan pascabencana tsunami, mengimbau negara-negara untuk memberikan bantuan, mendukung pelaksanaan Konferensi Pengurangan Risiko Bencana di Kobe, menghargai kesepakatan Paris Club untuk memberikan moratorium atau menunda pembayaran utang bagi negara yang terkena bencana, serta mendorong dibentuknya kemitraan atas permintaan dan dipimpin oleh negara tuan rumah dengan negara donor, lembaga keuangan internasional dan regional, serta pihak-pihak lain.

Setelah pemerintah Indonesia berhasil mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN khusus membahas bencana tsunami, negara Jepang tidak tinggal diam melihat negara-negara disekitar Samudra Hindia menjadi korban dari ganasnya gempa dan tsunami yang melanda negara-negara berkembang, termasuk

Indonesia. Dengan sigapnya Jepang dan PBB mengadakan Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana atau *Disaster Reduction* untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana. Untuk menggalang dan menjaga komitmen negara donor, PBB lalu membentuk sebuah konsorsium global atau pembiayaan bersama (*Global Consortium for Tsunami-Affected Countries*) dan menunjuk seorang utusan khusus. Setelah proses pemilihan yang intensif dan melibatkan calon-calon dari Jepang dan Thailand, posisi ini kemudian diisi mantan Presiden Amerika Serikat, William Jefferson (Bill) Clinton, yang diberi mandat untuk bekerja selama dua tahun. Sebuah landasan hukum dan prinsip kerja sama di tingkat internasional bagi berlanjutnya perhatian dan bantuan dunia yang telah terbentuk. Hasil yang pantas dari sebuah perjuangan diplomasi antar benua (Cross, 2006).

Penderitaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam yang terdampak bencana mendorong berbagai negara untuk memberi bantuan kemanusiaan. Salah satu negara yang paling pertama memiliki inisiatif untuk terlibat dalam memberikan bantuan di Aceh adalah Jepang. Keterlibatan Jepang dalam memberikan bantuan dan upaya penanggulangan bencana di Nanggroe Aceh Darussalam mendapatkan sorotan dari dunia Internasional. Dikarenaka negara Jepang merupakan negara yang kerap sekali di landa bencana, akan tetap negara ini selalu sigap dalam menghadapi bencana. Jepang memiliki pengalaman yang sangat luas serta memiliki kemampuan teknologi yang didukung oleh kemampuan bertahan masyarakat yang sangat tinggi dan memiliki sistem penanggulangan bencana (*Disaster Management*) terbaik di Dunia. Seluruh pengalaman yang dimiliki Jepang membuat negara ini menyadari akan pentingnya pertolongan yang dibutuhkan suatu negara disaat negara tersebut terkena bencana alam. Kesadaran itu menjadikan Jepang aktif dalam memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan pertolongan dari negara lain. (Arie, 2009)

Jepang dan Indonesia telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama dan dalam berbagai bentuk kerjasama, khususnya dalam bidang pengendalian bencana. Dimulai sejak

tahun 1962 dimana pasca perjanjian perdamaian antara Jepang dan Indonesia, pemerintah Jepang telah mengirim tenaga ahlinya dibidang perairan dalam kerangka OCTA yang kemudian diubah menjadi *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Kronologi hubungan Jepang dan Indonesia dimulainya pada Proyek Pengembangan Terpadu DAS hilir Sungai Brantas pada tahun 1958. Hubungan ini semakin kuat ketika pada 30 Januari sampai 10 Februari 1962 mendapat kunjungan Putra Mahkota Akhito dan Putri Michiko ke Indonesia yang mewakili Kaisar dan Permaisuri. Mengkuatnya kerjasama Jepang dan Indonesia dalam bidang akademik dibuktikan ketika tahun 1963 terbentuknya Perhimpunan Alumni dari Jepang (PERSADA), kemudian pendirian Universitas Darma Persada oleh alumni dari Jepang pada tahun 1986. Kunjungan Kaisar dan Permaisuri ke Indonesia pada tahun 1991. Hingga ketika Indonesia dilanda krisis Moneter pada tahun 1998, Jepang memberikan paket bantuan yang cukup besar. (BRR2, 2015)

Ketika gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam menjadi berita internasional, tidak hanya pemerintah Indonesia yang bergerak cepat untuk membantu warga Aceh, namun bencana ini telah menarik perhatian negara-negara di dunia. Terhitung hingga 56 negara yang telah datang dan memberikan bantuan asing kepada Indonesia khusus nya Aceh.

Negara luar yang menawarkan diri untuk memberikan bantuan asing pertama kali yaitu Australia, 10 juta dolar Australia ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Alexander Downer memberitahukan bahwa Australia akan menawarkan bantuan lebih jauh bila dibutuhkan. Kemudian Tanggal 5 Januari 2005 di Jakarta, Perdana Menteri John Howard mengumumkan paket bantuan senilai 1 miliar dolar Australia bagi Indonesia dan Paket bantuan bilateral itu terdiri dari grant assistance dan pendanaan konsesi yang sama besarnya. Sebagai bagian dari bantuan Australia, Australian Defence Force (ADF) juga bekerja memberikan bantuan, bersama-sama pasukan AS. 900 personel tak bersenjata bekerja di Indonesia, termasuk di antaranya 15 pengendali lalu-lintas udara yang mengatur pemberian bantuan yang sangat besar di Aceh.

Selain itu negara Kamboja dan Tiongkok juga menyalurkan bantuan berupa dan yang berjumlah besar. Makau dari Palang Merah Makau menyumbangkan dana senilai 35 juta MOP. Pemerintah federal India memberikan bantuan senilai 1 miliar rupee (23 juta dolar AS) ke Sri Lanka dan Maladewa USD \$23 million, sebagai tambahan bagi sejumlah kapal perang dan pesawat yang diperbantukan untuk mendistribusikan bantuan.